Asas Akuntabilitas dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Anggota Parlemen di Indonesia

Suwari Akhmaddhian, Titan Triatna Kurniawan

Fakultas Hukum, Universitas Kuningan, Indonesia

Email : titan@gmail.com

Abstract

The purpose of this study is to determine the principle of accountability plays an important role for the formation of good governance (Good Government) and to know the form of good governance can play an important role for the formation of accountability. The research method used by the author is Normative Juridical, with data collection tools through literature study. The results of the study showed that Good Governance or good governance wherein the thought originated that the management of public administration is the main issue in achieving towards "clean government" and the Accountability Principle is the principle that determines that each activity and the final results of the activities of the Provider The state must be able to be accountable to the people or people as the holders of the highest sovereignty of the state.

Keywords: Accountability, good government.

Abstrak

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui asas akuntabilitas memegang peran penting bagi terbentuknya pemerintahan yang baik (*Good Government*) dan untuk mengetahui bentuk pemerintahan yang baik bisa memegang peranan penting bagi terbentuknya akuntabilitas. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah Yuridis Normatif, dengan alat pengumpul data melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Good Governance* atau pengelolaan pemerintahan yang baik dimana pemikiran tersebut bersumber bahwa pengelolaan administrasi publik merupakan issue utama dalam pencapaian menuju "*clean government*" (pemerintahan yang bersih) dan Asas Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara.

Kata Kunci : Akuntabilitas, good government.

PENDAHULUAN

Akuntabilitas mempunyai arti pertanggungjawaban yang merupakan salah satu ciri dari terapan "*Good Governance*" atau pengelolaan pemerintahan yang baik dimana pemikiran tersebut bersumber bahwa pengelolaan administrasi publik merupakan issue utama dalam pencapaian menuju "*clean government*" (pemerintahan yang bersih). Ada beberapa pilar *good governance* dalam berinteraksi satu dan lainnya yang saling terkait, yaitu: *Government*, *Citizen*, dan *Business* atau *State*, *Society* dan *Private Sector*. Pada dasarnya pilar tersebut mempunyai konsekuensi akuntabilitas terhadap publik atau masyarakatnya, khususnya *stakeholders* yang yang melingkupi ketiga pilar tersebut sebagai pelaku "*How to govern*" atas aktivitasnya.

Akuntabilitas (accountability) yaitu berfungsinya seluruh komponen penggerak jalannya kegiatan perusahaan, sesuai tugas dan kewenangannya masing-masing. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai kewajiban-kewajiban dari individu-individu atau penguasa yang dipercayakan untuk mengelola sumber-sumber daya publik dan yang bersangkutan dengannya untuk dapat menjawab hal-hal yang menyangkut pertanggungjawabannya. Akuntabilitas terkait erat dengan instrumen untuk kegiatan kontrol terutama dalam hal pencapaian hasil pada pelayanan publik dan menyampaikannya secara transparan kepada masyarakat. Menurut Dubnick, akuntabilitas publik secara tradisional dipahami sebagai alat yang digunakan untuk mengawasi dan mengarahkan perilaku administrasi dengan cara

memberikan kewajiban untuk dapat memberikan jawaban (answerability) kepada sejumlah otoritas eksternal.¹

Asas Akuntabilitas adalah asy yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Orde Baru mewariskan rendahnya instrumen pertanggungjawaban institusi publik dan nyaris tidak meninggalkan mekanisme kelembagaan yang transparan dan menggali nilai – nilai partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan. Masyarakat lebih banyak berperan hanya sebagai obyek pembangunan dan bukan bekerja dalam pola *partnership* dalam peningkatan kinerja dan akuntabilitas pemerintah. Partisipasi masyarakat yang dibanggakan dalam perencanaan pembangunan melalui "*bottom up and top down planning*" yaitu pada bagian Diskusi Pembangunan Desa Tingkat Desa oleh LKMD dan menjadi kebanggaan bentuk partisipasi masyarakat di waktu yang lalu, yang ada hakekatnya adalah "mobilisasi" atau setidaknya-tidaknya tipe partisipasi "*statutory*", partisipasi yang diformat oleh pemerintah; yang pada akhirnya juga masih bersifat "memasung" demokratisasi lokal dalam perencanaan.² Apakah asas akuntabilitas memegang peran penting bagi terbentuknya pemerintahan yang baik (*Good Government*) ? dan Apakah pemerintahan yang baik bisa memegang peranan penting bagi terbentuknya akuntabilitas?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah Yuridis Normatif, dengan alat pengumpul data melalui studi kepustakaan yaitu studi dokumentasi peraturan perundang-undangan serta artikel-artikel yang terkait dengan penelitian ini

PEMBAHASAN

Menurut Mudakir Iskandar Syah (2007) bahwa bila dibandingkan dengan definisi kepentingan umum diatas maka rumusan kepentingan umum yang terdapat dalam perpres no 36 tahun 2005 jo perpres no 65 tahun 2006 adalah lebih tepat dengan menggunakan rumusan "sebagian besar lapisan masyarakat" oleh karena salah satu sarana umum itu belum tentu dapat dinikmati semua masyarakat kata "sebagian besar" mempunyai arti tiak semua masyarakat namun dapat dianggap untuk semua masyarakat walaupun dari sebagian besar itu ada sebagian kecil masyarakat yang tidak bisa menikmati hasil atau manfaat dari fasilitas pembangunan kepentingan umum itu sendiri.

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan penyelenggara organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Pertanggung jawaban penyelenggara sekolah merupakan akumulasi dari keseluruhan pelaksanaan tugas-tugas pokok dan fungsi sekolah yang perlu disampaikan kepada publik/*stakeholders*. Akuntabilitas kinerja sekolah adalah perwujudan kewajiban sekolah

¹<http://www.definisi-pengertian.com/2015/04/definisi-pengertian-akuntabilitas-konsep.html> (diakses pada 17 Juni 2019, pukul 13.18)

²<http://armingsh.blogspot.com/2011/01/asas-asas-umum-pemerintahan-yang-baik.html> (diakses pada 17 Juni 2019, pukul 13.19)

untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan rencana sekolah dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah tidaklah bisa terlepas dari suatu pembicaraan mengenai pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Maka dari itu, dalam penyelenggaraan pemerintahan, baik kekuasaan secara vertikal maupun horizontal yang telah diatur dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemisahan kekuasaan secara horizontal melahirkan lembaga-lembaga tingkat pusat yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif dengan mekanisme cek and balance. Sedangkan secara vertikal lebih dikenal dengan pembagian kekuasaan teritorial. Hal inilah yang memunculkan konsep tentang pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Pengawasan pemerintahan tidak hanya dilakukan oleh badan/organ diluar struktur pemerintahan akan tetapi juga dilakukan dalam internal pemerintahan. Hubungan organ antara atasan dan bawahan yang tercermin dalam susunan organisasi negara.

Akuntabilitas meliputi pertanggungjawaban penyelenggara sekolah yang diwujudkan melalui transparansi dengan cara menyebarluaskan informasi dalam hal:

1. pembuatan dan pelaksanaan kebijakan serta perencanaan,
2. anggaran pendapatan dan belanja sekolah,
3. pengelolaan sumberdaya pendidikan di sekolah, dan
4. keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan rencana sekolah dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
5. Akuntabilitas dapat dikategorikan menjadi :
6. Akuntabilitas kebijakan, yaitu akuntabilitas pilihan atas kebijakan yang akan dilaksanakan
7. Akuntabilitas kinerja (*product/quality accountability*), yaitu akuntabilitas yang berhubungan dengan pencapaian tujuan sekolah
8. Akuntabilitas proses, yaitu akuntabilitas yang berhubungan dengan proses, prosedur, aturan main, ketentuan, pedoman, dan sebagainya., dan akuntabilitas keuangan (kejujuran) atau sering disebut (*financial accountability*), yaitu akuntabilitas yang berhubungan dengan pendapatan dan pengeluaran uang (*cash in and cash out*). Sering kali istilah *cost accountability* juga digunakan untuk kategori akuntabilitas ini.³

Akuntabilitas memegang peran penting bagi terbentuknya pemerintahan yang baik, Akuntabilitas didefinisikan sebagai pertanggungjawaban pihak yang diberi mandat kepada mereka yang diberi mandat itu. Jadi, akuntabilitas memang sebuah pertanggungjawaban yang perlu dibarengi dengan pengawasan terhadap pihak-pihak yang diberi amanah. Pengawasan ini dapat dilakukan oleh pihak luar seperti media, yang punya peranan cukup penting bagi terciptanya akuntabilitas suatu instansi. Menurut Guy Peter, ada tiga tipe dalam akuntabilitas, antara lain: (1) akuntabilitas keuangan, (2) akuntabilitas administratif, dan (3) akuntabilitas kebijakan publik.

Akuntabilitas yang baik, akan mengurangi adanya tindak kecurangan di suatu instansi. Dengan adanya pengawasan dan pertanggungjawaban, maka pihak-pihak yang diberi amanah akan lebih merasa takut melakukan tindakan kecurangan. Setidaknya tindakan kecurangan

³<https://nawarsyarif.blogspot.com/2015/10/makalah-akuntabilitas.html> (diakses pada 17 Juni 2019, pukul 13.20)

pada perusahaan yang memiliki akuntabilitas yang baik dapat lebih diminimalisir jika dibandingkan dengan instansi yang bahkan tidak memiliki akuntabilitas yang memadai. Akuntabilitas yang memadai merupakan pertanggungjawaban yang dibarengi dengan pengawasan yang baik, terstruktur, terdapat sanksi yang tegas apabila dilanggar, dan mengikat pekerja di instansi tersebut.

Sudah seharusnya, pemerintah maupun petinggi-petinggi di instansi-instansi yang ada di Indonesia membenahi transparansi dan akuntabilitas di instansinya agar tindakan kecurangan dapat diminimalisir. Apalagi di level pemerintahan yang sepertinya sudah mulai mengabaikan dua prinsip ini. Pemerintah sudah seharusnya membenahi sistem yang ada agar tidak ada lagi kasus korupsi maupun tindak kecurangan lainnya yang dapat merugikan negara dan masyarakat. Sanksi yang tegas bagi pelaku tindak kecurangan juga diperlukan sebagai tindakan represif, selain perbaikan di sisi transparansi dan akuntabilitas, sehingga mampu terwujud tata pemerintahan yang baik (good governance).

Akuntabilitas Sebagai Pelaporan Keuangan, Sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), BPKP membantu mewujudkan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan negara dan daerah. Akuntabilitas pelaporan keuangan negara masih memerlukan perbaikan sebagaimana ditandai dengan masih belum diperolehnya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2011, demikian juga atas 20 kementerian/lembaga (K/L) atau 23% dari total K/L, serta pada hampir semua pemerintah daerah (pemda), yaitu 431 pemda atau 87% dari 498 pemda yang diaudit BPK.

Kegiatan yang dilakukan BPKP untuk mendukung terwujudnya akuntabilitas pelaporan keuangan meliputi antara lain :

1. Kegiatan pendampingan penyusunan laporan keuangan K/L/pemda,
2. Reviu laporan keuangan K/L/pemda sebelum diaudit oleh BPK,
3. Menindaklanjuti hasil temuan BPK,
4. Pendampingan perbaikan sistem pelaporan,
5. Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA),
6. Sosialisasi, pembentukan satgas, dan workshop SPIP, dan
7. peningkatan kapasitas SDM pengelolaan keuangan daerah dan APIP

Secara umum, beberapa faktor yang menyebabkan laporan keuangan K/L dan pemda tersebut belum memperoleh opini WTP adalah karena penyajian yang belum sepenuhnya sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), lemahnya sistem pengendalian intern, belum tertatanya barang milik negara/daerah dengan tertib, pengadaan barang yang belum mengikuti ketentuan yang berlaku, dan kurang memadainya kapasitas SDM pengelola keuangan. Upaya tersebut merupakan tindak lanjut dari direktif Presiden, yang pada intinya mendorong ditingkatkannya akuntabilitas pengelolaan keuangan negara melalui kerjasama antara K/L/Pemda dengan BPKP.

Kerjasama tersebut ditujukan terutama untuk mengatasi berbagai faktor penyebab tidak diperolehnya opini WTP, antara lain mencakup penguatan SPIP pada K/L/Pemda, reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), pendampingan penyusunan laporan keuangan dan pendampingan reviu laporan keuangan instansi bagi APIP K/L/pemda untuk meningkatkan kualitas penyajian laporan keuangan agar sesuai dengan SAP, penerapan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) yang dibangun oleh BPKP, pendampingan penataan barang milik negara/daerah, peningkatan kapasitas SDM pengelola

keuangan, sosialisasi peraturan dan pedoman bidang keuangan, bimbingan teknis pengelolaan keuangan negara/daerah, serta penugasan pegawai BPKP ke berbagai K/L dan Pemda.⁴

Upaya perbaikan tersebut menunjukkan komitmen yang tinggi dan langkah nyata dari pimpinan K/L/pemda yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan.

Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) menjadi hal penting karena merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah terhadap pelaksanaan APBD. Untuk mengetahui akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah perlu dilakukan pemeriksaan (diaudit). Pemeriksaan tentang akuntabilitas LKPD dilakukan BPK RI sebagai pemeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan Negara sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 23E ayat 1 menyebutkan, "Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri". Dalam menjalankan tugasnya untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, salah satunya adalah BPK memeriksa laporan keuangan pemerintah daerah sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, "BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan Negara".⁵

Peraturan perundang - undangan pemerintah daerah adalah sebagai berikut sebagai berikut : Pertama , dalam Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1945. Pada periode ini organ yang ada di daerah adalah Badan Perwakilan Rakyat Daerah (BPRD) sebagai DPRD serta Dewan Eksekutif dan Kepala Daerah sebagai Pemerintah daerah. Pelaksanaan fungsi dan kewenangan dimaksud tampak masih berat sebelah karena kewenangan Kepala Daerah sangat dominan, di samping sebagai BPRD dalam membuat peraturan daerah, juga sebagai pimpinan Badan Eksekutif yang menjalankan pemerintahan sehari - hari. Dalam penjelasan undang - undang ini hanya disinggung sedikit tentang pertanggungjawaban kepala daerah , yang intinya bahwa materi pertanggungjawaban kepala daerah adalah mengenai segala lapangan pekerjaan tentang selfgovernment. Sedangkan pertanggungjawabannya adalah vertical kepada pemerintah pusat. Kedua , dalam Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1948. Berdasarkan undang - undang ini Pemerintah daerah terdiri atas dua institusi , yaitu DPRD dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) serta Kepala Daerah. Prinsip yang terkandung dalam undang - undang ini cenderung mengikuti format pertanggungjawaban yang dilakukan pemerintah pusat dengan sistem parlementer. Hal ini dapat dilihat bahwa DPD sebagai pelaksana pemerintahan sehari - hari bertanggungjawab kepada DPRD dan dapat pula diberhentikan DPRD. Format yang demikian menunjukkan bahwa kedudukan DPRD lebih dominan (superior) daripada DPD. Sementara kepala daerah hanya sebagai pengawas pemerintah pusat.

Ketiga , dalam Undang - Undang Nomor 6 Tahun 1959 dan Nomor 5 Tahun 1960. Sebagai instrumen yuridis dalam penataan pemerintah daerah di bawah keberlakuan UUD 1945 setelah Dekrit Presiden 5 Juli 1959, undang - undang ini mengatur struktur pemerintah

⁴<https://nawarsyarif.blogspot.com/2015/10/makalah-akuntabilitas.html> (diakses pada 17 Juni 2019, pukul 13.21)

⁵<http://armingsh.blogspot.com/2011/01/asas-asas-umum-pemerintahan-yang-baik.html> (diakses pada 17 Juni 2019, pukul 13.21)

daerah yang terdiri dari kepala daerah dan DPRD. Kepala daerah berfungsi ganda, selain sebagai kepala daerah otonom juga wakil pemerintah pusat . Meskipun DPRD tidak dapat menjatuhkan Kepala daerah , Kepala daerah otonom bertanggungjawab kepada DPRD. Sebagai alat pemerintah pusat, Kepala daerah bertanggungjawab kepada Pemerintah pusat .⁶

Tujuan utama akuntabilitas adalah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja sekolah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya sekolah yang baik dan terpercaya. Penyelenggara sekolah harus memahami bahwa mereka harus mempertanggungjawabkan hasil kerja kepada publik. Selain itu, tujuan akuntabilitas adalah untuk menilai kinerja sekolah dan kepuasan publik terhadap pelayanan pendidikan yang diselenggarakan oleh sekolah, untuk mengikutsertakan publik dalam pengawasan pelayanan pendidikan, dan untuk mempertanggungjawabkan komitmen pelayanan pendidikan kepada publik.

Untuk mengukur kinerja mereka secara obyektif perlu adanya indikator yang jelas. Sistem pengawasan perlu diperkuat dan hasil evaluasi harus dipublikasikan dan apabila terdapat kesalahan harus diberi sanksi. Sekolah dikatakan memiliki akuntabilitas tinggi jika proses dan hasil kinerja sekolah dianggap benar dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Korupsi atau rasuah (bahasa Latin *Corruptio* dari kata *corrumpere* yang bermakna busuk, rusak menggoyahkan, memutarbalik, menyogok) adalah tindakan pejabat publik ,baik politisi maupun pegawai negeri,serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak⁷

Dari sudut pandang hukum, tindak pidana korupsi secara garis besar memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. perbuatan melawan hukum,
 2. penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana,
 3. memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi, dan
 4. merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
- Jenis tindak pidana korupsi di antaranya, namun bukan semuanya, adalah

1. memberi atau menerima hadiah atau janji (penyuapan),
2. penggelapan dalam jabatan,
3. pemerasan dalam jabatan,
4. ikut serta dalam pengadaan (bagi pegawai negeri/penyelenggara negara), dan
5. menerima gratifikasi (bagi pegawai negeri/penyelenggara negara).

Dalam arti yang luas, korupsi atau korupsi politis adalah penyalahgunaan jabatan resmi untuk keuntungan pribadi. Semua bentuk pemerintah|pemerintahan rentan korupsi dalam praktiknya. Beratnya korupsi berbeda-beda, dari yang paling ringan dalam bentuk penggunaan pengaruh dan dukungan untuk memberi dan menerima pertolongan, sampai dengan korupsi berat yang diresmikan, dan sebagainya. Korupsi yang muncul di bidang politik dan birokrasi bisa berbentuk sepele atau berat, terorganisasi atau tidak. Walau korupsi sering memudahkan kegiatan kriminal seperti penjualan narkoba, pencucian uang, dan prostitusi, korupsi itu sendiri tidak terbatas dalam hal-hal ini saja. Untuk mempelajari masalah ini dan membuat solusinya, sangat penting untuk membedakan antara korupsi dan kejahatan.⁸

⁶<https://core.ac.uk/download/pdf/11716289.pdf> (diakses pada 17 Juni 2019, pukul 13.22)

⁷<https://id.wikipedia.org/wiki/Korupsi> (diakses pada 17 Juni 2019, pukul 13.23)

⁸<https://acch.kpk.go.id/id/jejak-pemberantasan/uu-30-tahun-2002-komisi-pemberantasan-tindak-pidana-korupsi> (diakses pada 17 Juni, pukul 13.24)

Korupsi Rp 7 Miliar, Anggota DPR RI Musa Zainuddin Divonis 9 Tahun Penjara, Terdakwa Anggota DPR RI Musa Zainuddin divonis sembilan tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsidair tiga bulan kurungan. Musa Zainuddin terbukti korupsi menerima suap Rp 7 miliar dari Direktur Utama PT Windhu Tunggal Utama Abdul Khoir terkait proyek pembangunan infrastruktur di Maluku dan Maluku Utara. "Mengadili menyatakan terdakwa Musa Zainuddin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama," kata Hakim Ketua Mas'ud saat membacakan putusan di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Rabu (15/11/2017)

Putusan tersebut lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yakni dituntut pidana penjara 12 tahun dan denda Rp 1 miliar subsidair enam bulan kurungan. Musa dinilai terbukti secara sah bersalah korupsi yakni menerima suap hadiah atau janji sebesar Rp 7 miliar dari Direktur Utama PT Windhu Tunggal Utama Abdul Khoir. Pemberian uang tersebut untuk mempengaruhi Musa agar mengusulkan program tambahan belanja/prioritas/optimalisasi/ on tip dalam bentuk proyek pembangunan infrastruktur di Maluku dan Maluku Utara. Politikus Partai Kebangkitan Bangsa itu dinilai terbukti melanggar Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana.⁹

Regulasi yang Mengatur Tindak Pidana Korupsi, Berbagai kebijakan tersebut tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Berdasarkan ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, badan khusus tersebut yang selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi, memiliki kewenangan melakukan koordinasi dan supervisi, termasuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, sedangkan mengenai pembentukan, susunan organisasi, tata kerja dan pertanggung jawaban, tugas dan wewenang serta keanggotaannya diatur dengan Undang-undang.

Selain itu, dalam usaha pemberdayaan Komisi Pemberantasan Korupsi telah didukung oleh ketentuan-ketentuan yang bersifat strategis antara lain:

1. ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang memuat perluasan alat bukti yang sah serta ketentuan tentang asas pembuktian terbalik;

⁹<http://www.tribunnews.com/nasional/2017/11/15/terbukti-korupsi-rp-7-miliar-anggota-dpr-ri-musa-zainuddin-divonis-9-tahun-penjara> (diakses pada 17 Juni 2019, pukul 13.24)

2. ketentuan tentang wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi yang dapat melakukan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap penyelenggara negara, tanpa ada hambatan prosedur karena statusnya selaku pejabat negara;
3. ketentuan tentang pertanggungjawaban Komisi Pemberantasan Korupsi kepada publik dan menyampaikan laporan secara terbuka kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Badan Pemeriksa Keuangan;
4. ketentuan mengenai pemberatan ancaman pidana pokok terhadap Anggota Komisi atau pegawai pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang melakukan korupsi; dan
5. ketentuan mengenai pemberhentian tanpa syarat kepada Anggota Komisi Pemberantasan Korupsi yang melakukan tindak pidana korupsi.¹⁰

SIMPULAN

Akuntabilitas mempunyai arti pertanggungjawaban yang merupakan salah satu ciri dari terapan "*Good Governance*" atau pengelolaan pemerintahan yang baik dimana pemikiran tersebut bersumber bahwa pengelolaan administrasi publik merupakan issue utama dalam pencapaian menuju "*clean government*" (pemerintahan yang bersih). Asas Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SARAN

Penulis banyak berharap para pembaca yang budiman sudi memberikan kritik dan saran apapun kepada penulis pada sesi tanya jawab, demi sempurnanya makalah ini, dan makalah di kesempatan-kesempatan berikutnya. Semoga makalah ini berguna bagi penulis pada khususnya juga para pembaca yang budiman pada umumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Darwin Ginting, "kapita slekta hukum agraria", Jakarta: fokusindo mandiri, 2013
Indonesia, Undang-Undang Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, UUNo. 5 tahun 1960, Pasal 18.
Indonesia, Penjelasan Umum Undang-Undang Tentang Pencbutan hak-hak Atas tanah dan Benda-Benda yang ada diatasnya, UU No 20 Tahun 1961
Undang-undang nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum
Undang undang nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara
Perpres RI No. 65 Tahun 2006 tentang Pengadaan Tanah
<https://acch.kpk.go.id/id/jejak-pemberantasan/uu-30-tahun-2002-komisi-pemberantasan-tindak-pidana-korupsi>
<https://id.wikipedia.org/wiki/Korupsi>
<http://www.tribunnews.com/nasional/2017/11/15/terbukti-korupsi-rp-7-miliar-anggota-dpr-ri-musa-zainuddin-divonis-9-tahun-penjara>

¹⁰<https://acch.kpk.go.id/id/jejak-pemberantasan/uu-30-tahun-2002-komisi-pemberantasan-tindak-pidana-korupsi>
(diakses pada 17 Juni 2019, pukul 13.25)

<https://media.neliti.com/media/publications/152685-ID-impementasi-akuntabilitas-dan-transpara.pdf>

<https://core.ac.uk/download/pdf/11716289.pdf>

<http://www.definisi-pengertian.com/2015/04/definisi-pengertian-akuntabilitas-konsep.html>